

## Urgensi Rekrutmen Politik Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik di Partai NasDem Kota Bandung

Agung Tesa Gumilar<sup>a, 1\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

<sup>1</sup> agungtg88@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

Received: 2 Oktober 2022;

Revised: 23 Oktober 2022;

Accepted: 28 Oktober 2022.

Kata-kata kunci:

Rekrutmen Politik;

Partisipasi Politik;

Partai NasDem.

---

### ABSTRAK

Artikel penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana mekanisme rekrutmen politik sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik di partai NasDem Kota Bandung. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengetahui fenomena di atas secara mendalam, khusus, faktual dan kontekstual. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, studi literatur dan studi dokumentasi. Temuan penelitian ini adalah terdapat urgensi dan pertimbangan dalam melakukan rekrutmen anggota partai NasDem Kota Bandung meliputi yang meliputi dua hal, yang pertama yaitu faktor pertimbangan yang bersifat politis dan yang kedua yaitu faktor pertimbangan yang bersifat kriteria bagi calon anggota. Kedua hal di atas bertujuan agar rekrutmen politik yang dilaksanakan oleh partai NasDem Kota Bandung dapat berjalan dengan baik, efektif dan mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya dalam keanggotaan atau sebagai agen politik pada suatu partai politik.

---

### Keywords:

Political Recruitment;

Political Participation;

NasDem Party.

---

### ABSTRACT

*The Urgency of Political Recruitment as an Effort to Enhance Political Participation in the NasDem Party of Bandung City. This study aims to describe how the mechanism of political recruitment as an effort to increase political participation in the NasDem party in Bandung. This research approach is qualitative with the case study method to find out the above phenomena in depth, specifically, factually and contextually. Data collection techniques in this study were interviews, observation, literature studies and documentation studies. The findings of this study are that there is urgency and consideration in recruiting members of the Bandung City NasDem party which includes two things, the first is political considerations and the second is criteria considerations for prospective members. The two things above are intended so that the political recruitment carried out by the NasDem party in Bandung City can run well, be effective and be able to increase people's political participation, especially in membership or as a political agent in a political party.*

---

Copyright © 2022 (Agung Tesa Gumilar). All Right Reserved

How to Cite : Gumilar, A. T. (2022). Urgensi Rekrutmen Politik Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik di Partai NasDem Kota Bandung. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(10), 396–402. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/1688>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Dalam literatur-literatur ilmu politik dijelaskan bahwa partai politik memiliki beberapa fungsi, seperti yang dijelaskan oleh Budiardjo (2008, hlm. 405-409) yang membagi fungsi partai politik menjadi empat fungsi, yaitu sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana pengatur konflik dan sebagai sarana rekrutmen politik.

Fungsi-fungsi partai politik tersebut merupakan sebuah sistem yang saling berkaitan satu sama lain, tak terkecuali fungsi rekrutmen politik yang menjadi gerbang bagi para aktivis politik untuk tergabung dalam sebuah gerakan partai politik tertentu (Nurazizah dkk, 2015). Seperti yang dijelaskan oleh Budiardjo (2008, hlm. 408) bahwa fungsi rekrutmen politik berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas.

Dalam kehidupan politik sebuah negara tidak dapat dikesampingkan bahwa partai politik memiliki peran dan fungsi dalam mewujudkan kepentingannya (Wahyudi, 2018). Diantara fungsi yang dimiliki oleh partai politik tersebut diantaranya dikemukakan oleh Blondel (dalam Darmawan 2009, hlm. 66) bahwa partai politik mempunyai tiga fungsi utama. Fungsi pertama, pada *level* masyarakat secara keseluruhan, partai politik mengartikulasikan konflik-konflik sosial dengan cara menciptakan hubungan antara rakyat dengan pemerintah (Solikhin, 2017). Fungsi kedua, pada *level* sistem politik, partai politik merumuskan kebijakan-kebijakan kepada pemerintah (Sukriono, 2018). Fungsi yang terakhir, pada *level* kehidupan politik sehari-hari, partai politik memainkan peran utama dalam perekrutan bagian terbesar dari elit politik (Maarotong, 2020).

Berbicara tentang rekrutmen politik, dalam hal ini Surbakti menyatakan (2010, hlm. 150) bahwa rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Pendapat lain tentang rekrutmen politik dikemukakan oleh (Gaffar, 2006) bahwa rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan politik dalam sebuah negara agar sistem politik dapat memfungsikan dirinya dengan sebaik-baiknya guna memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan itulah fungsi rekrutmen politik menjadi hal yang sangat penting bagi keberlangsungan partai politik itu sendiri (Tumanduk, 2022). Karena rekrutmen politik bertujuan untuk mendapatkan dan menyaring anggota yang akan masuk ke dalam partai politik tersebut. Kemudian para anggota itu akan mengikuti kaderisasi berupa penanaman wawasan serta pelatihan untuk dipersiapkan sebagai kader yang akan menduduki jabatan-jabatan politik, baik di internal partai maupun di pemerintahan (Siregar, 2020).

Setiap partai politik tentu ingin merekrut kader-kader yang berkualitas. Karena kader-kader tersebutlah yang nantinya menjadi ujung tombak dalam setiap kebijakan yang diambil baik oleh internal partai ataupun setelah menduduki jabatan tertentu dalam suprastruktur politik.

Akan tetapi fungsi rekrutmen politik tersebut harus di tunjang dengan proses kaderisasi di internal partai. Karena proses kaderisasi merupakan suatu proses pengembanglan terhadap anggota agar mampu menjalankan roda organisasi dalam keberlangsungan kehidupan partai politik. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa proses kaderisasi merupakan tahap mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, wawasan dan kemampuan bertindak lebih dan unggul jika dibandingkan dengan orang awam pada umumnya.

Namun realitanya dewasa ini partai politik justru dihadapkan pada permasalahan yang berkaitan dengan rekrutmen dan kaderisasi itu sendiri (Sudrajat, 2016). Salah satu masalah yang sering muncul adalah tentang lemahnya pola rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik. Hal tersebut dapat dilihat dari fenomena yang sering menjadi masalah bagi beberapa partai politik, seperti anggota partai yang sering berpindah-pindah partai atau politisi kutu loncat.

Selain persoalan di atas masih banyak pula kader parpol yang terjerat kasus- kasus pelanggaran hukum seperti tindak pidana korupsi, hal ini membuktikan bahwa masih ada kelemahan

dalam sistem kaderisasi yang dilakukan. Berdasarkan pemberitaan laman Kompas.com (25/9/2014) data dari Indonesian Corruption Watch (ICW) pada tahun 2014 mencatat ada 48 calon anggota legislatif terpilih periode 2014-2019 yang terjerat kasus korupsi. Dari 48 anggota legislatif tersebut sebanyak 32 orang berstatus sebagai tersangka korupsi, 15 orang lainnya berstatus terdakwa dan 1 orang berstatus sebagai terpidana. Bahkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan terdapat sekitar 3.600 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terjerat kasus korupsi.

Berdasarkan data tersebut sangat jelas terlihat bahwa ada kelemahan yang terjadi pada sistem rekrutmen dan kaderisasi di partai politik. Realita tersebut merupakan masalah yang sangat penting bagi bangsa ini, karena partai politiklah yang seharusnya menghasilkan calon-calon pemimpin bangsa yang memiliki integritas dan visi yang jelas.

Pada kenyataannya sering sekali partai politik melakukan perekrutan hanya dalam waktu-waktu yang mendekati pelaksanaan pemilu saja. Hal tersebut menyebabkan munculnya kader-kader instan yang tidak memiliki kecakapan dan kompetensi pada saat menduduki jabatan politik. Seharusnya partai politik mempersiapkan kader-kadernya sejak jauh-jauh hari agar mereka memiliki wawasan yang prima, kecakapan dan kompetensi yang baik dan bertanggung jawab sesuai tugas yang diembannya.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu gagasan rekrutmen dan kaderisasi yang jelas yang dimiliki oleh setiap partai politik. Karena apabila sebuah partai politik berhasil dalam membentuk kader-kader yang berkualitas, maka partai politik tersebut juga dapat menghasilkan pemimpin nasional yang berkualitas. Apabila proses kaderisasi ini gagal, maka estafeta kepemimpinan dari generasi tua ke generasi muda akan terhambat. Hambatan dalam proses kaderisasi ini akan menciptakan sebuah kekecewaan. Kekecewaan ini salah satunya diwujudkan dengan membentuk partai politik baru dengan berbagai macam visi dan misi yang selalu mengumandangkan pembaharuan.

## Metode

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengetahui fenomena di atas secara mendalam, khusus, faktual dan kontekstual. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, studi literatur dan studi dokumentasi. Lokasi penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah kantor sekretariat DPD Partai NasDem Kota Bandung Jl. Peta Kota Bandung.

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan subyek penelitian pertama (Herni Herdiani) diperoleh informasi bahwa sebenarnya siapapun boleh saja bergabung dengan partai NasDem, namun dalam perkembangannya sebagai sebuah organisasi modern tentu partai memiliki standar yang diterapkan terhadap para calon anggotanya. Biasanya faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam merekrut anggota dilihat dari aspek pendidikan, keahlian dan tentunya memiliki moral yang baik. Dia menegaskan bahwa hal tersebut menjadi *filter* bagi bagi kader-kader NasDem kedepannya, karena tidak dapat dipungkiri selain membutuhkan modal *financial* yang besar untuk *political cost*, keunggulan kualitas sumber daya manusia kader NasDem nantinya akan berpengaruh besar dalam perbaikan-perbaikan negara ini.

Kemudian subyek penelitian kedua (Rendiana Awangga) menegaskan bahwa faktor pendidikan dan *skill* itu menjadi hal penting yang harus diutamakan dalam merekrut anggota. Hal itu dikarenakan bahwa sebagai partai yang mengusung semangat perubahan, NasDem ingin memberikan kontribusi yang lebih bagi penyelesaian-penyelesaian masalah yang ada di masyarakat. Dia menyatakan, karena dengan bermodalkan pendidikan yang baik maka anggota atau kader NasDem sudah seharusnya mengabdikan pemikiran, gagasan dan keahlian yang mereka miliki untuk menjadi solusi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat yang apatis, apolitis dan cenderung tidak percaya terhadap partai politik.

Sementara itu, menurut subyek penelitian ketiga (Vicoso Merdian) faktor yang menjadi pertimbangan dalam merekrut anggota baru tidak hanya pada ruang lingkup pendidikan saja, akan tetapi Dia menegaskan bahwa faktor idelaisme dan loyalitas dalam berpartaipun menjadi pertimbangan. Dia menuturkan hal tersebut dikarenakan banyak sekali fenomena politisi kutu loncat, artinya sebagai partai yang ideologis maka NasDem harus memiliki kader-kader yang ideologis juga. Dia berpendapat bahwa faktor tersebut dapat mencegah NasDem merekrut anggota yang hanya memanfaatkan momentum pemilu guna mencari kendaraan politik semata.

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, menurut subyek penelitian keempat (M. Rahmat) justru lebih menekankan pada faktor ketokohan dan pengaruh terhadap massa yang menjadi pertimbangan dalam melakukan rekrutmen. Dia mengutarakan bahwa dalam konteks peta politik yang skalanya lebih luas faktor ketokohan dan pengaruh juga menjadi penting, hal ini akan berdampak pada tingkat elektabilitas partai. Dia memberikan ilustrasi bahwa jika partai NasDem merekrut salah satu tokoh sunda di Jawa Barat dan kemudian tokoh tersebut menjadi calon anggota legislatif misalnya, maka secara otomatis dukungan politik massa yang ada pada bidang ketokohan orang tersebut akan memilihnya dan partai NasDem. Namun, Dia menekankan bahwa secara umum dalam konteks personal tentunya partai NasDem juga mempertimbangkan faktor-faktor yang lain seperti pendidikan, pengalaman, keahlian, financial, dan moral dalam melakukan rekrutmen anggota.

Sedangkan pandangan berbeda dilontarkan oleh subyek penelitian kelima (Cernan Melandi), Dia menuturkan bahwa pertimbangan merekrut kaum muda, kaum pergerakan, kaum mahasiswa, kaum buruh, kaum seniman/budayawan dan kaum tani juga menjadi pertimbangan bagi rekrutmen yang dilakukan oleh partai NasDem. Dia menegaskan bahwa hal ini membuktikan bahwa NasDem adalah milik siapa saja, artinya semua golongan harus ada di dalam tubuh partai NasDem dalam bahu membahu menciptakan gerakan perubahan restorasi Indonesia.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat bahwa terdapat pertimbangan politik yang signifikan dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang direkrut sebagai anggota partai NasDem. Pertimbangan tersebut biasanya dibahas di dalam rapat rutin internal pengurus partai. Terlebih lagi untuk calon anggota yang memiliki popularitas dan pengaruh basis masa yang kuat. Hal tersebut sudah menjadi tahapan sesuai dengan AD dan ART partai dalam menentukan kebijakan yang akan berdampak luas bagi keberlangsungan partai NasDem.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, peneliti dapat menggambarkan bahwa dalam melaksanakan mekanisme rekrutmen, DPD partai NasDem Kota Bandung memposisikan diri sebagai organisasi politik yang modern dan berpikiran maju ke depan atau *visioner*. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya standar atau kriteria yang menjadi pertimbangan dalam setiap melakukan rekrutmen calon anggota. Kriteria tersebut memang tidak tertulis secara resmi sebagai dokumen partai, bahkan kriteria tersebut lebih banyak bersifat pertimbangan secara politis. Namun secara ideal, kriteria tersebut berkaitan dengan hal-hal penunjang guna menciptakan kondisi organisasi yang unggul dalam hal kualitas sumber daya manusia. Kriteria tersebut meliputi pada aspek-aspek sebagai berikut: (1) Integritas, (2) Pengalaman (3) Pendidikan (4) Keahlian/Skill (5) Ketokohan (6) Kalangan Profesi (7) Kesamaan Visi dan Misi (8) Loyalitas Terhadap Partai.

Pertama Integritas. DPD Partai NasDem Kota Bandung sangat mengutamakan faktor integritas yang baik yang harus dimiliki oleh setiap calon anggotanya, hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan dikarenakan berkaitan dengan gagasan restorasi yang diusung oleh partai. Gagasan restorasi itu sendiri secara umum bisa diartikan sebagai perubahan *mind set* atau pola pikir masyarakat dari kepura-puraan menjadi keterusterangan. Maka dari itu, partai NasDem ingin memperlihatkan bahwa sebagai partai politik mereka mampu hadir dengan anggota yang memiliki integritas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, memiliki kejujuran serta ketulusan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

Kedua pengalaman. Sebagai partai politik yang masih baru, NasDem tetap menjadikan faktor pengalaman sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan rekrutmen calon anggotanya. Hal tersebut bertujuan agar terdapat kolaborasi serta transformasi pengetahuan yang baik antara anggota yang sudah memiliki pengalaman di dunia politik praktis dengan kader-kader muda atau bahkan kader yang baru memasuki dunia politik.

Ketiga Pendidikan. Aspek pendidikan juga menjadi salah satu indikator dalam proses perekrutan calon anggota partai NasDem. Hal tersebut dimaksudkan agar calon anggota yang akan bergabung dengan partai NasDem memiliki basis keilmuan yang sesuai dengan posisi atau jabatan yang akan diemban pada saat menjalankan keorganisasian partai.

Keempat Keahlian/Skill. Sebagai partai politik tentunya NasDem membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di berbagai bidang. Hal tersebut dimaksudkan agar kader-kader NasDem mampu melaksanakan rencana dan strategi dalam mempersiapkan serta mengikuti proses pemilihan umum.

Kelima Ketokohan. Faktor ketokohan menjadi faktor yang cukup penting bagi partai NasDem dalam melaksanakan proses rekrutmen calon anggotanya. Hal tersebut didasarkan pada pengaruh masa yang biasanya dimiliki seorang tokoh di masyarakat. Faktor ketokohan tersebut menjadi modal sosial bagi NasDem dalam meraih suara pada pemilihan umum.

Kelima Kalangan Profesi. Kalangan profesi merupakan salah satu indikator penting bagi partai politik, khususnya juga bagi NasDem yang menjadikan kalangan profesi sebagai kriteria rekrutmen calon anggotanya. Hal tersebut bertujuan agar semua status sosial yang ada di masyarakat dapat terangkul dan terakomodir dalam sebuah kendaraan politik yakni partai NasDem. Hal tersebut terbukti dari beberapa sayap partai NasDem yang dibentuk berdasarkan klasifikasi kalangan profesi diantaranya ada Liga Mahasiswa NasDem (LMN) yang anggotanya merupakan mahasiswa-mahasiswa se Indonesia, kemudian ada Badan Advokasi Hukum (BAHU) yang merupakan kader-kader NasDem yang berasal dari kalangan pakar hukum dan advokat, kemudian ada Petani NasDem yaitu organisasi sayap yang menghimpun petani-petani di Indonesia yang tergabung dalam partai NasDem.

Keenam Kesamaan Visi dan Misi. Faktor ini juga menjadi kunci bagi NasDem dalam merekrut calon anggotanya, hal tersebut bertujuan agar partai dan anggota dapat mewujudkan serta menjalankan visi dan misi yang sama, yaitu gerakan perubahan Restorasi Indonesia.

Ketuju Loyalitas terhadap Partai. Faktor loyalitas terhadap partai dimaksudkan agar kader-kader yang nantinya mengisi jabatan baik di internal partai maupun di lembaga politik mampu merepresentasikan kepentingan partai. Selain itu, faktor tersebut juga menjadi *filter* agar tidak terjadinya fenomena politisi kudu loncat di partai NasDem.

Indikator yang dijelaskan di atas sangat disadari oleh DPD Partai NasDem Kota Bandung sebagai modal yang harus dimiliki oleh sebuah partai politik dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik di lembaga legislatif maupun di masyarakat secara langsung. Dalam pelaksanaannya, pertimbangan tersebut dapat diputuskan melalui tahapan-tahapan rapat pengurus internal partai.

Berdasarkan data empiris yang telah dikemukakan di atas, hal tersebut sangat relevan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ariwibowo, dkk, (2010, hlm. 10) yang menyatakan bahwa terdapat empat tipe rekrutmen politik dalam kebiasaan praktik politik di sebuah negara. Yang pertama adalah tipe partisipan, yaitu sebuah tipe rekrutmen yang didasarkan pada basis pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis. Kemudian tipe yang kedua adalah tipe *compartmentalization*, merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang, misalnya aktivis LSM. Selanjutnya adalah tipe *immediate survival*, yaitu tipe rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut. Selain itu, tipe

yang terakhir adalah tipe *civil service reform*, yaitu tipe rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seseorang calon anggota sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau tinggi.

Berdasarkan data empiris yang telah dikemukakan di atas, hal tersebut juga didukung oleh pendapat yang dikemukakan Blondel (dalam Darmawan 2009, hlm. 66) yang menyatakan bahwa partai politik mempunyai tiga fungsi utama. Fungsi pertama, pada *level* masyarakat secara keseluruhan, partai politik mengartikulasikan konflik-konflik sosial dengan cara menciptakan hubungan antara rakyat dengan pemerintah. Hal tersebut terlihat dari indikator atau kriteria yang ditetapkan oleh DPD Partai NasDem Kota Bandung dalam melaksanakan rekrutmen calon anggota. Secara sederhana, kriteria tersebut akan membantu para kader NasDem dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat publik, baik sebagai anggota legislatif maupun di pemerintahan.

Hal tersebut juga didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Soebagio (2009, hlm. 112) yang menyebutkan bahwa di dalam praktik ilmu politik, partai politik memiliki fungsi rekrutmen politik yang kemudian ditunjang dengan fungsi kaderisasi. Fungsi kaderisasi ini merupakan tindak lanjut dari fungsi rekrutmen yang berupa pendidikan dan pelatihan bagi kader-kader partai tersebut. Kemudian, setelah menjalani kaderisasi yang berisi penanaman doktrin-doktrin partai, maka para kader tersebut akan dipersiapkan untuk bisa menduduki jabatan publik sebagai bentuk regenerasi kepemimpinan di partai politik.

Oleh karena itu, jika calon anggota yang akan direkrut dapat memenuhi harapan yang diinginkan oleh partai, maka tugas partai dalam menjalankan fungsi sebagai wadah aspirasi rakyat akan semakin baik, sehingga tercipta situasi politik yang komunikatif, efektif dan kondusif antara pemerintah dengan rakyatnya. Kemudian, hal tersebut juga akan berdampak pada fungsi-fungsi lainnya yang dimiliki oleh partai politik. Seperti, fungsi pada *level* sistem politik, partai politik merumuskan kebijakan-kebijakan kepada pemerintah. Kemudian, fungsi pada *level* kehidupan politik sehari-hari, partai politik memainkan peran utama dalam perekrutan bagian terbesar dari elit politik.

Pendapat tersebut sejalan dengan yang diutarakan oleh Budiardjo (2008, hlm. 408) bahwa fungsi rekrutmen tersebut berkaitan dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri.

Hal senada juga diungkapkan oleh Friedrich (dalam Budiardjo, 2008 hlm. 404) yang menyatakan bahwa partai politik merupakan organisasi yang berisi kumpulan atau kelompok manusia yang beraktivitas secara terorganisir serta menjaga stabilitas internalnya. Aktivitas-aktivitas tersebut bermuara pada tujuan partai politik itu sendiri, yakni menempatkan kadernya pada lingkaran kekuasaan di pemerintahan. Akan tetapi, pada proses menempatkan kader tersebut harus diawali dengan merekrut aktivis-aktivis politik yang berbakat dan berpengalaman dalam dunia politik. Kemudian setelah itu partai politik melakukan kaderisasi yang bertujuan untuk mempersiapkan kader-kader terbaik yang akan mengambil peran dalam tugas politiknya sebagai kader partai politik. Maka dari itu, nilai kemanfaatan yang dirasakan setelah melewati proses rekrutmen dan kaderisasi tersebut akan berdampak pada berhasil atau tidaknya tujuan partai tersebut dalam menduduki jabatan-jabatan dalam kekuasaan pemerintah.

Selain itu, tujuan dari adanya standarisasi rekrutmen yang dibuat oleh DPD Partai NasDem Kota Bandung bertujuan untuk membangun partai menjadi sebuah lembaga politik yang kuat dalam tatanan sistem politik. Hal tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Huntington (dalam Haris 2014, hlm, 45) yang menyatakan bahwa partai-partai politik yang kuat dan terinstitutionalkanlah yang menjanjikan terbangunnya demokrasi yang lebih baik. Maka dari itu, NasDem sebagai partai politik memiliki harapan yang sama dalam membangun suasana demokrasi yang lebih baik.

Berdasarkan hal tersebut, maka dengan adanya kriteria yang ditetapkan oleh DPD partai NasDem Kota Bandung dalam melaksanakan rekrutmen calon anggota bertujuan untuk menjaring kader-kader partai yang berkualitas untuk membangun partai sebagai lembaga politik yang terbuka dan partisipatif. Hal tersebut dilakukan berkaitan dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik di internal partai maupun kepemimpinan nasional.

## Simpulan

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam melakukan rekrutmen anggota Dewan Pimpinan Daerah partai NasDem Kota Bandung meliputi dua hal, yang pertama yaitu faktor pertimbangan yang bersifat politis dan yang kedua yaitu faktor pertimbangan yang bersifat kriteria bagi calon anggota. Faktor pertimbangan yang bersifat politis adalah pertimbangan-pertimbangan yang dihasilkan melalui rapat pimpinan dan rapat pengurus partai dalam hal merekrut calon anggota yang berasal dari kalangan elit politik. Sedangkan faktor pertimbangan kriteria merupakan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada latar belakang baik secara pengetahuan, *skill* dan pengalaman dalam hal merekrut anggota secara umum. Kedua hal di atas bertujuan agar rekrutmen politik yang dilaksanakan oleh partai NasDem Kota Bandung dapat berjalan dengan baik, efektif dan mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya dalam keanggotaan atau sebagai agen politik pada suatu partai politik.

## Referensi

- Ariwibowo, dkk. (2013). Pola Rekrutmen Pemilihan Calon Anggota Legislatif oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdi Perjuangan) Menjelang Pemilu 2014 di Kota Semarang. Universitas Diponegoro.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu politik*. Jakarta: Gramedia.
- Darmawan, Cecep. (2008). *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Laboratorium PKn Press.
- Fadjar, Abdul Mukhtie. (2013). *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Gaffar, Afan. (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haris, Syamsuddin. (2014). *Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Maarotong, J. (2020). Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Komunikasi Politik (Suatu Studi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud). *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 8(4).
- Nurazizah, N., Usman, J., & Prianto, A. L. (2015). Kaderisasi Partai Nasdem Dalam Menghadapi Pemilu Legislatif 2014 Di Kabupaten Maros. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1).
- Siregar, Z. R. (2020). *Partai Politik Dan Rekrutmen (Studi Sistem Rekrutmen Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Pemuda)* (Bachelor's thesis, Fisip UIN Jakarta).
- Soebagio. (2009). Distorsi dalam Transisi Demokrasi di Indonesia. Universitas Islam Syekh Yusuf.
- Solikhin, A. (2017). Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia. *Journal of Governance*, 2(1).
- Sudrajat, T. (2016). Penerapan Manajemen Strategik Untuk Partai Politik Pada Era Demokratisasi: Tantangan, Permasalahan Dan Prospek. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 13(2), 305-326.
- Sukriono, D. (2018). Desain Pengelolaan Keuangan Partai Politik Berbasis Demokrasi Menuju Kemandirian Partai Politik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 37-46.
- Tumanduk, M. C., Pati, A. B., & Tompodung, J. (2022). Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal eksekutif*, 2(2).
- Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63-83.